



Kalbar Dianugerahi Piagam Penghargaan WTP



HUMAS FOR PONTIANAK POST

Sanjaya.

Wakil Presiden Boediono mengungkapkan pemerintah menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menciptakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

• ke halaman 15 kolom 6

SERAHKAN

Wakil Presiden Boediono menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diterima oleh Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Tahun 2012, dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah.

PENGHARGAAN tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Budiono, didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri kepada 69 Kementerian Negara dan lembaga, serta 116 Pemerintah Daerah. Salah satunya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diterima oleh Wakil Gubernur, Christiandy



Kalbar Dianugerahi ...

Sambungan dari halaman 9

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan penghargaan tersebut patut disyukuri. Pemerintah Kalimantan Barat terus berupaya mempertahankannya, serta meningkatkan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Menurut Christiandy, tantangan kedepannya sangat berat. Ia meminta seluruh kabupaten dan kota di Kalbar yang belum mendapatkan WTP agar segera menyelesaikan persoalan keuangan di daerahnya sehingga bisa mendapatkan predikat yang sama (WTP).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerin-

tah pusat berhasil menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2004 sejak 2005. Laporan ini terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan tersebut diaudit dan diberikan opini oleh BPK RI, kemudian disampaikan kepada DPR enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tersebut hanya berupa perhitungan anggaran negara yang disampaikan kepada DPR untuk dibahas menjadi UU, dua tahun sesudah berakhir tahun anggaran. *(uni/r)*